



Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : BPK Pusat

Halaman 8

Istana: Setop Curi Uang Rakyat



● DEBBIE SUTRISNO, FAUZIAH MURSUD

Indonesia dinilai memasuki darurat korupsi.

JAKARTA — Juru Bicara Istana Negara, Johan Budi SP turut mengomentari

mengenai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat Kementerian Perhubungan yang dilakukan, Rabu (23/8) malam. Menurutnya, kasus korupsi yang melibatkan pejabat di Kementerian Perhubungan merupakan perbuatan yang memalukan.

Johan mengatakan, sebagai pejabat pemerintahan sudah sepatutnya untuk menjauhi aksi korupsi. Seorang pejabat harus bisa menggunakan anggaran ke-

uangan negara dengan baik serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. "Dan, tidak mencuri uang dari rakyat," kata Johan di Istana Negara, Kamis (24/6).

Johan menilai, pembersihan mafia korupsi di kementerian dan lembaga, baik di pemerintah pusat maupun daerah, harus terus dilakukan. Namun, upaya ini memang tidak bisa dijalankan dalam waktu singkat. Masih ada satu dua oknum jahat yang masih memanfaatkan kedudukannya untuk mencari uang dari

jalan pintas, seperti korupsi.

Terkait dengan OTT KPK di Kementerian Perhubungan yang kedua kalinya tahun ini, Johan belum memastikan akan ada pemanggilan Menteri Perhubungan. Hal yang perlu digarisbawahi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menekankan agar semua pihak, bukan hanya di kementerian, agar tidak menerima uang dari mana pun yang nantinya akan menjadi uang hasil korupsi.

Wakil Ketua MPR Mahyudin juga menilai, Indonesia saat ini sudah memasuki darurat tindak pidana korupsi. Hal ini ia sampaikan mengingat makin banyaknya penyelenggara negara yang tertangkap KPK karena kedapatan bertransaksi suap.

"Yang saya singgung tadi, Indonesia mengalami darurat korupsi yang merupakan musuh bersama. Kita tahu di Indonesia penjahat awalnya VOC bangkrut karena korupsi. Indonesia tidak tertutup kemungkinan kalau tidak selesai korupsi bisa bangkrut," ujar Mahyudin.

Mahyudin mengatakan, saat ini korupsi telah menjangkit mulai dari tertinggi negara sampai juga pejabat desa. Ia mencontohkan peristiwa yang belum lama terjadi, yakni korupsi penyalahgunaan dana desa. Oleh karenanya, memerangi korupsi harus dilakukan bersama-sama.

"Memerangnya dengan berikan kesadaran pada aparat penyelenggara negara rasa tanggung jawab kepada Tanah Air dan cinta Tanah Air," ujar Mahyudin. Ia juga menekankan pentingnya digalakkan budaya malu kepada para pejabat yang melakukan korupsi. Sebab, maraknya korupsi juga karena sudah tidak adanya budaya malu bagi pihak

yang mencuri yang rakyat.

Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat, OTT uang gencar digelar KPK terkesan tidak menimbulkan efek jera karena hukumannya ringan. Karena itu, menurut Fickar, sudah sewajarnya jika hukuman bagi koruptor ditingkatkan supaya ada efek jera.

"Pastinya tidak ada efek jera karena pabrikasi korupsi terus berjalan. Orang tidak takut dengan OTT karena akhirnya hukumannya ringan. Seharusnya, standar minimal hukuman koruptor 15 tahun atau seumur hidup agar ada penjeratan," kata Fickar saat dihubungi *Republika*, Kamis (24/8).

Penyebab lain orang tidak lagi takut tertangkap OTT KPK karena saat ini korupsi sudah diletakkan sebagai sebuah bisnis oleh sebagian penyelenggara negara. Bahkan, para koruptor tersebut sudah melakukan hitung-hitungan yang akurat sehingga ketika mereka keluar dari penjara, hartanya tetap berlimpah. "Korupsi sudah diletakkan sebagai sebuah bisnis. Orang bisa berhitung, mengalkulasi berapa bujet *ketangkap* melakukan korupsi sampai dengan keluar penjara, tapi tetap masih banyak hartanya," ucap Fickar.

Fickar mengatakan, gencarnya KPK menggelar OTT tiada lain karena banyaknya masyarakat yang berani membuat laporan dan pengaduan sebagai dasar dilakukannya operasi. Selain itu, menurutnya para pejabat yang melakukan korupsi juga merupakan dampak negatif gencarnya pembangunan ekonomi di negeri ini. Apalagi, pembangunan ekonomi tidak dibarengi pembangunan spiritual. ■ *dadang kurnia edi: fitriyani zamzami*